

INTERAKSI SOSIAL DAN REPRODUKSI NILAI BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN DI PELABUHAN PAOTERE KOTA MAKASSAR

M. Syaiful

Prodi Sosiologi Agama UIN

Alauddin Makassar

syaifulsimolla@yahoo.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya interaksi sosial dari lokalitas masyarakat terlihat berbur, namun kemudian tidak lantas meninggalkan orisinalitas kebudayaan bahari yang menjadi corak asli masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere. Perubahan ruang sosial juga telah menyebabkan perubahan kebudayaan pada sejumlah aspeknya. Selain itu, mobilitas sosial yang terjadi cukup intens telah mempengaruhi identitas masyarakat nelayan melalui penggunaan simbol-simbol baru yang diciptakan secara kolektif. Kecenderungan ini didorong juga oleh media yang kemudian menyebabkan kebudayaan bersifat reproduktif.

Kata Kunci: *Kebudayaan, Bahari, Maritim, Pelabuhan, Nelayan, Pesisir, Paotere.*

A. LATAR BELAKANG

Sejumlah studi yang terkait dengan kajian masyarakat maritim menunjukkan bahwa budaya bahari di dunia sangatlah kompleks. Kompleksitas budaya bahari tersebut ditunjukkan oleh sejumlah fenomena unik yang melekat pada masyarakatnya. Oleh karenanya, masyarakat bahari selalu diidentifikasi sebagai masyarakat yang memiliki corak dan struktur sosial khas yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sallatang (1982), misalnya menggambarkan masyarakat bahari sebagai mereka yang mendiami wilayah pesisir atau pulau-pulau dan memanfaatkan sumberdaya kelautan atau sumberdaya bahari dalam rangka interaksi sosialnya dalam jangka waktu lama dan telah membentuk kehidupan bersama yang serasi dan telah mewujudkan "rasa kita" (*we-feeling*) di antara mereka. "Rasa kita" (*we-feeling*) itu, terwujud dalam interaksi mereka dalam mengambil peranan (*role-taking*) secara teratur dan rasa saling bergantung (*defendency-feeling*) satu sama lain.

Dalam sistem budaya bahari terdiri dari unsur-unsur sistem seperti; pengetahuan, gagasan, keyakinan/kepercayaan, nilai, dan norma/aturan dan pengenalan lingkungan sosialnya berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya dan jasa-jasa laut. Unsur-unsur sistem tersebut menjadi regulator masyarakat bahari dan di lain pihak, masyarakat bahari mendukung dan memberikan energi kepada budaya bahari. Keterhubungan antara informasi budaya bahari dan penguatan energi dalam sistem sosial masyarakat akan menyebabkan masyarakat bahari di satu pihak membentuk kepribadian, watak atau jiwa bahari individu anggota-anggotanya dan di lain pihak, individu anggota masyarakat bahari mendukung dan memberikan energi kepada masyarakat bahari (Sallatang, 1982).

Dalam wujudnya nilai-nilai budaya bermanifestasi ke dalam lembaga yang dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Lembaga (*institution*) merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia. Lembaga adalah proses-proses terstruktur atau tersusun guna melaksanakan berbagai kegiatan tertentu. (Horton, 1996)

Selo Soemardjan dalam buku *Setangkai Bunga Sosiologi* (1964) mengemukakan posisi penting lembaga dengan merujuk pada pendapat dari Gillin dan Gillin sebagai berikut,

A social institution is a functional configuration of culture patterns (including actions, ideas, attitudes, and cultural equipment) which possesses a certain permanence and which is intended to satisfy felt social needs.

Dari penuturan Gillin dan Gillin tersebut, tidak berlebihan rasanya jika Soerjono Soekanto memberikan pengertian terdekat dari lembaga sosial sebagai pranata sosial. Hal ini dikarenakan istilah *social institution* lebih merujuk pada unsur-unsur yang mengatur perikelakuan para anggota masyarakat. Selain itu, dari apa yang didefinisikan Gillin dan Gillin mengenai *social institution* juga memperlihatkan kekhasan dari suatu masyarakat karena memuat pola-pola kebudayaan seperti tindakan, gagasan, dan sikap serta peralatan budaya yang memiliki ke-*ajeg*-an dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Sejalan dengan Gillin dan Gillin, Horton dan Hunt juga menegaskan bahwa lembaga adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dalam definisi tersebut, nilai-nilai umum mengacu pada cita-cita dan tujuan bersama; prosedur umum adalah pola-pola perilaku yang dibakukan dan diikuti; dan sistem hubungan adalah jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku tersebut. Koentjaraningrat (1981) juga memberikan pemahaman mengenai pranata sebagai sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola tertentu. Selain itu menurutnya, institusi atau pranata juga bekerja sebagai suatu sistem

norma yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat.

Setiap individu atau kelompok masyarakat menganut budaya yang mengandung sistem nilai-nilai (*value system*) dan nilai-nilai ini terwujud dalam bentuk kebajikan-kebajikan (*virtues*). Masyarakat melalui komunitasnya menuntut agar kebajikan-kebajikan tersebut diberlakukan dan ada sanksi sosial terhadap mereka yang tidak melakukannya. Oleh karena itu, masing-masing keluarga/masyarakat berupaya mensosialisasikan nilai-nilai tersebut melalui pesan kepada anggota keluarganya. Pembiasaan tingkah laku kebajikan tersebut diharapkan menjadi kebiasaan dan pada gilirannya akan menjadi karakter. Raka (2011) mengelompokkan kebajikan kedalam 6 kategori yakni; 1. Kearifan dan pengetahuan (*wisdom and knowledge*), 2. Keberanian (*courage*), 3. Kemanusiaan (*humanity*), 4. Keadilan (*justice*), 5. Pembatasan diri (*temperance*) dan, 6. Transendensi (*trancedency*).

Berkaitan dengan itu, masyarakat pesisir suku bangsa Bugis dan Makassar, Mattulada (1983) dalam tulisannya menggambarkan orang Bugis dan Makassar yang tinggal di daerah pantai dan pulau-pulau kecil, mencari ikan merupakan suatu mata pencaharian hidup yang amat penting. Dalam hal ini, mereka menangkap ikan dengan perahu-perahu layar sampai jauh di laut. Orang Bugis Makassar sebagai suku bangsa pelaut di Nusantara ini telah mengembangkan suatu kebudayaan maritim sejak beberapa abad yang lalu. Sebagai suku bangsa pelaut, mereka telah mampu menciptakan teknologi pelayaran yang sesuai dengan alam lingkungan kelautan, ciptaan perahu layar yang terkenal seperti tipe 'Pinisi' dan 'Lambo' telah teruji kemampuannya mengarungi perairan Nusantara bahkan sampai ke Srilanka dan Filipina untuk "berniaga." Kemampuan berlayar dengan teknologi pelayaran yang dimiliki itu telah mendorong terciptanya hukum niaga dalam pelayaran, seperti "*Ade allowilayahloping Bicaranna PabbaluE*" yang tertulis pada lontarak oleh Amanna Gappa" pada abad ke-17 (1667). Dengan tulisan tersebut, terungkap jelas bahwa masyarakat nelayan suku Bugis-Makassar telah mengembangkan kemampuannya menjadi masyarakat nelayan yang tertata pada suatu sistem sosial kemasyarakatan dengan orientasi kebudayaan kepada laut sebagai sarana dalam rangka aktivitas kehidupan mereka maupun dalam kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan laut. Hal tersebut juga tergambar dalam kehidupan masyarakatnya yang mampu mengembangkan kemampuan dalam bidang pelayaran penangkapan ikan, teknologi pelayaran, usaha perdagangan dan aturan-aturan hukum dibidang perdagangan.

Hal yang berhubungan dengan masalah nilai dapat terlihat pada penekanan pada sifat egalitarian, aturan bagi hasil, pengaturan hak-hak pemilikan, prinsip yang mendasari adanya kerjasama dan adanya pengerahan tenaga kerja (Sallatang, 1982). Strategi yang berhubungan dengan masalah ideologi dapat dilihat pada adanya berbagai macam ritual, magis dan kepercayaan yang berhubungan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan strategi nelayan yang berhubungan dengan teknologi dapat dijumpai pada adanya berbagai macam alat tangkap dan mobilitas yang dilakukan.

Oleh karena itu, aspek nilai budaya maritim nelayan Bugis-Makassar menjadi salah satu aspek yang akan dilihat dalam konteks budaya lokal. Contoh konkret adalah sehubungan dengan terjadinya dinamika perubahan sosial masyarakat nelayan melalui pengetahuan dan teknologi tradisional di satu pihak dan pengetahuan dan teknologi modern pada pihak yang lain, sehingga konteks nilai budaya lokal ini diduga akan mempunyai pengaruh terhadap formasi sosial baru masyarakat nelayan yang terbentuk akibat modernisasi.

Persoalannya hari ini, dimana suatu daerah yang tidak lagi memiliki batas area kebudayaan yang jelas dan malah mengabur. Suatu kondisi yang disebabkan oleh arus modernisasi serta kencangnya globalisasi yang melingkupi suatu daerah kebudayaan yang tidak menutup kemungkinan proses dinamika yang terjadi di dalamnya cukup kompleks untuk dipahami melalui pendekatan tertentu. Hal ini pula mendorong dalam penelitian ini untuk mengungkap aspek perubahan tersebut, terutama pada aspek nilai budaya yang ditenggarai turut berubah seturut kondisi masyarakat yang secara geografis berada di pesisir dan cukup terbuka dalam melakukan interaksi serta mobilitas yang tinggi dengan dunia luar.

Budaya lokal mengalami transformasi yang disebabkan karena proses adaptasi dengan kebudayaan lain. Adaptasi ini menyangkut nilai serta praktik-praktik kehidupan, dalam hal ini keberagaman kebudayaan akan terlihat sebagai suatu kekayaan dan bukan sebagai suatu ancaman bagi kebudayaan lain karena dalam contoh nyata seperti di lingkungan transmigrasi, adanya adaptasi kebudayaan dari masyarakat pendatang menjadi penambah keberagaman dalam hal reproduksi nilai-nilai baru kepada masyarakat lokal.

Pemahaman mengenai proses reproduksi kultural yang menyangkut bagaimana 'kebudayaan asal' direpresentasikan dalam lingkungan baru, masih sangat terbatas. Penelitian kesukubangsaan umumnya menitikberatkan kebudayaan sebagai 'pedoman' dalam adaptasi dan kelangsungan hidup, sehingga lebih melihat aspek produktif dari sebuah kebudayaan. Sementara itu, aspek reproduktif yang menjadi kecenderungan baru di dalam menjelaskan perubahan-perubahan kontemporer, masih kurang diperhatikan. Dalam konteks Indonesia, diskusi yang mengarah pada proses pemaknaan kembali kultur daerah asal ini masih bersifat baru, khususnya dalam memberikan pemahaman baru mengenai konteks sosial budaya yang berubah-ubah (Abdullah, 2006).

Pelabuhan Paotere di Kota Makassar yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, setidaknya merupakan salah satu daerah yang didiami oleh suku Makassar. Perkembangannya cukup pesat sebagai salah satu sentra ekonomi kelautan yang didukung oleh kebijakan pemerintah setempat dengan meningkatkan sejumlah infrastruktur pusat pelelangan ikan dan pasar. Sebagai salah satu pelabuhan penyeberangan dan pelelangan ikan, Pelabuhan Paotere setidaknya disandari oleh kapal-kapal pemuat ikan yang berasal dari berbagai penjurur pesisir di Sulawesi Selatan bahkan ada yang berasal dari Sulawesi Tenggara dan Kalimantan. Ikan-ikan ini lalu didistribusikan ke pelosok daerah di Sulawesi Selatan, dan ada pula yang bahan baku ekspor beberapa perusahaan ikan. (Data lapangan, 25 April 2019)

Kapitalisasi dan modernisasi begitu nampak bila kita memasuki kawasan Pelabuhan Paotere, di mana aktivitas ekonomi ditopang oleh struktur-struktur ekonomi yang saling menunjang. Bila kita perhatikan, institusi yang berwenang mengatur tata tertib dan aturan pelayaran nelayan serta menarik retribusi pada setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di pelabuhan. Institusi atau norma cukup terlihat mengatur sistem pelabuhan yang diatur melalui struktur pelebagaan punggawa yang memiliki modal, pemilik kapal, dan penjual ikan bahkan ada yang disebut *pa'cata* yang berperan sebagai perantara atau *broker*. Tidak hanya sampai di situ, keterkaitan antara pelelangan ikan dengan berbagai warung makan di sekitarnya juga terbangun melalui mekanisme tersendiri, di mana pembeli cukup membeli ikan dan membawanya ke warung untuk dihidangkan. Begitupula dapat kita jumpai beberapa penjual ikan yang dilakoni oleh kalangan perempuan. Beberapa aktivitas lainnya juga terjadi di kawasan ini, seperti jual beli kebutuhan bahan pokok. Berbagai infrastruktur yang ada kelihatan mendukung semua mekanisme pasar yang memang ditopang oleh kebijakan pemerintah setempat dalam hal pemerintah daerah Kota Makassar.

Kondisi tersebut tidak lepas begitu saja dari berbagai pertanyaan seputar dinamika yang terjadi di Pelabuhan Paotere. Pertanyaan antropologis justru mengemuka dengan memperhatikan individu dan masyarakat yang berada di daerah tersebut, sesuai dengan lokus penelitian ini yang dibatasi pada persoalan masalah nilai budaya. Dalam penelitian ini mencoba untuk mengkonfirmasi dinamika yang terjadi di Pelabuhan Paotere dengan persoalan institusi/lembaga atau sistem nilai masyarakat pesisir. Sebenarnya ada banyak studi tentang sosial dan budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau sejauh ini, yang telah dilakukan oleh para peneliti dalam antropologi dan sosiologi, tapi tentu saja masih ada banyak fenomena penting yang belum pernah dipelajari dengan menggunakan asumsi dan pendekatan tertentu. Sehubungan dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, maka seperti yang telah diuraikan di atas akan menjadi *standing point* untuk memahami nilai budaya masyarakat di Pelabuhan Paotere, Kota Makassar.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam pembahasan sebelumnya, salah satu kunci untuk memahami perilaku individu atau masyarakat adalah dengan mengemukakan aspek budaya masyarakat bersangkutan yang setidaknya mengandung sistem nilai-nilai (*value system*) yang terlihat melalui pembiasaan tingkah laku dan terbangun ke dalam institusi sosial yang pada gilirannya akan menjadi karakter. Begitu pula pada masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, terlepas dari aspek deterministik yang mempengaruhi lingkungannya juga memiliki kekhasan dalam nilai budayanya sebagai masyarakat pesisir. Dalam asumsi penelitian ini, mencoba untuk mempertanyakan nilai budaya yang terbangun seiring arus modernisasi dan kapitalisasi yang

terjadi daerah Pelabuhan Paotere. Karena bukan tidak mungkin perubahan nilai budaya dapat terjadi dengan melihat kondisi masyarakat pesisir yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Untuk itu, asumsi awal dibangun dengan memfokuskan penelitian pada (1) Identifikasi nilai-nilai budaya dalam pranata masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, dan (2) Bagaimana reproduksi nilai budaya dalam pranata masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere.

Dengan dua pertanyaan penelitian tersebut, penulis berupaya menggambarkan masyarakat pesisir bukan lagi sesuatu yang khas dan kaku tetapi masyarakat dengan nilai budaya yang bereproduksi seiring dengan perubahan dimensi lain yang mengelilinginya.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian. Usaha dalam penelitian ini adalah mengenai bekerjanya institusi yang memuat nilai-nilai budaya dan dipraktekkan masyarakat pesisir di Pelabuhan Paotere. Sehingga menghasilkan sebuah gambaran atau data mengenai (1) Nilai-nilai budaya masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, dan (2) reproduksi nilai budaya dalam paranata masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere sebagai suatu masyarakat pesisir.

Kegunaan Penelitian. Pada sisi akademis, corak ilmiah menjadi hal yang penting dalam rangkaian kegiatan penelitian. Setidaknya kaidah-kaidah ilmiah yang ditempuh mampu memberikan sebuah argumentasi mengenai masyarakat di Pelabuhan Paotere sebagai masyarakat maritim. Argumentasi yang penulis kedepankan akhirnya memunculkan perdebatan pada tema masyarakat maritim di mana berbagai pendekatan di dalamnya saling beradu. Pada titik inilah kami memberikan kontribusi dalam dunia ilmiah utamanya dalam ilmu sosial budaya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak pengambil kebijakan karena sejumlah temuan yang ada di dalamnya cukup signifikan berkaitan dengan pengaruh program pemerintah itu dan sejauh mana langkah pemerintah telah berkontribusi serta efeknya dalam membangun perekonomian masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere.

D. KERANGKA PIKIR

Perubahan yang terjadi secara meluas dalam masyarakat bukan saja menjelaskan bagaimana interaksi masyarakat dengan berbagai faktor yang menentukan penataan sosial secara meluas. Perubahan dalam suatu kelompok masyarakat seperti dalam masyarakat pesisir/maritim harus dilihat dalam konteks perubahan global yang terjadi dan memiliki pengaruh dalam penataan sosial hingga ke tingkat yang paling kecil. Hal ini disebabkan oleh globalisasi yang membutuhkan respons yang tepat karena ia memaksa adanya suatu strategi yang tepat. Proses ini telah membawa ruang publik yang disebut pasar menjadi kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial.

Abdullah (2007) mengemukakan bahwa pasar mampu memperluas orientasi masyarakat dan mobilitas sehingga batas-batas sosial budaya selain meluas juga cenderung mengabur akibat berubahnya orientasi ruang dalam masyarakat. Satu tempat dengan tempat lain dengan mudah dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman nyata yang dialami sendiri, melalui pengalaman sendiri, dan melalui saluran media. Tempat-tempat pun mengalami perubahan karakter akibat interaksi dengan berbagai nilai yang berlainan dari berbagai kelompok masyarakat. Pertemuan antarorang dalam setting semacam ini telah mengubah karakter sampai pada nilai budaya kelompok masyarakat. Pendapat ini sekiranya juga didukung dengan pandangan Koentjaraningrat (1981) yang mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat banyak pula institusi sosial atau pranata yang justru tidak tumbuh dari dalam masyarakat tersebut, melainkan yang tidak sadar maupun dengan rencana diambil dari masyarakat lain.

Dapat ditelisik Pelabuhan Paotere dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya merupakan setting yang cukup kompleks. Sebagai salah satu daerah yang merupakan mayoritas masyarakatnya adalah etnis Makassar, bukan berarti budayanya harus dipahami seperti budaya yang orisinal, tetapi perspektif kita harus terbuka dengan relasi yang dialami masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere. Lokalitas dalam penelitian ini terlihat berbaur namun tidak meninggalkan orisinal kebudayaan maritim yang menjadi corak asli masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere. Perubahan ruang sosial telah menyebabkan perubahan pada kebudayaan. Mobilitas yang terjadi telah mempengaruhi identitas masyarakat melalui penggunaan simbol-simbol baru. Kecenderungan ini didorong juga oleh media yang kemudian menyebabkan kebudayaan bersifat reproduktif.

Proses reproduksi budaya dengan meminjam konsep dari Bourdieu tentang konversi antar modal (Dalam Jenkins, 1992), namun dengan tidak mengikuti keseluruhan kerangka teoritisnya. Reproduksi budaya dapat dijelaskan sebagai suatu proses di mana aspek-aspek tertentu dari sistem sosial budaya digunakan sebagai modal untuk diperkuat dan dipertukarkan dalam konteks arena pertarungan tertentu. Hal ini mendorong terjadinya proses konversi nilai budaya dalam rangka mempertahankan atau merubah bentuk-bentuk modal yang spesifik, misalnya dari modal kultural menjadi modal sosial, modal sosial menjadi modal ekonomi dan sebagainya. Kesemuanya menurut Bourdieu melibatkan empat jenis modal, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal kultural, dan modal simbolik.

Proses reproduksi kebudayaan merupakan proses aktif yang menegaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial, sehingga mengharuskan adanya adaptasi bagi kelompok yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Proses semacam ini merupakan proses sosial budaya yang penting karena menyangkut dua hal. Pertama, pada tataran masyarakat akan terlihat proses dominasi dan subordinasi budaya terjadi secara dinamis yang memungkinkan kita menjelaskan dinamika kebudayaan secara mendalam. Kedua, pada tataran individual akan dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi

identitas budaya sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya tertentu. Proses adaptasi ini berkaitan dengan dua aspek, yakni ekspresi kebudayaan dan pemberian makna akan tindakan-tindakan individual. Dengan kata lain, hal ini menyangkut dengan cara apa sekelompok orang dapat mempertahankan identitasnya sebagai suatu etnis di dalam lingkungan sosial budaya yang berbeda (Abdullah 2007).

Ada dua pranata yang dikaji dalam penelitian ini dengan memperhatikan berbagai kecenderungan yang nampak di lapangan; lingkungan sosial dalam hal ini kompleks Pelabuhan Paotere, pasar dan pemukiman sekitarnya, relasi-relasi dalam struktur masyarakatnya dengan pendatang/pengunjung, infrastruktur Pelabuhan Paotere sebagai benda-benda kebudayaan, serta aktivitas sosial lainnya. Dari kedua pranata yang akan dikaji yang *pertama*, adalah pranata ekonomi. Pada poin ini kecenderungannya dapat kita perhatikan melalui aktivitas pelayaran dan pelelangan ikan, serta aktivitas di pasar. *Kedua*, adalah adanya fenomena aktivitas perempuan di pelelangan dan peran mereka dalam struktur di pelabuhan Paotere. Secara teortik kedua pranata tersebut yang mengandung nilai-nilai masyarakat dipahami sebagai modal kultural yang mengalami konversi dalam proses reproduksi budaya.

Kedua komponen tersebut diangkat berdasarkan data empiris di lapangan dan setidaknya konsepsi penelitian ini merupakan tolak ukur dalam melihat dinamika masyarakat di Pelabuhan Paotere sebagai indikator dalam melihat fenomena perubahan yang terjadi. Karakteristik dapat ditemukan dalam kedua komponen tersebut untuk selanjutnya mendalami nilai-nilai yang tereproduksi di dalamnya. Pemahaman dibangun untuk mendapatkan proses reproduksi kultural yang menyangkut bagaimana “kebudayaan asal” direpresentasikan dalam lingkungan sosial. Budaya lokal masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere menyangkut nilai serta praktik-praktik kehidupan, dalam hal ini keberagaman kebudayaan akan terlihat sebagai suatu kerangka reproduktif.

E. METODE PENELITIAN

a. Tipe/Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil kajiannya merupakan sebuah deskripsi dan pemahaman tentang arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada pada situasi tertentu. Di mana aspek subyektif dari perilaku obyek akan menjadi penekanan dalam penggalian informasi yang dibutuhkan. Pemahaman akan dunia konseptual dari obyek berupaya dipahami sedemikian rupa sehingga, dalam penelitian ini didapatkan berbagai pemahaman atau pengertian yang dikembangkan oleh individu, pada berbagai peristiwa yang mereka hadapi dan pada perilaku yang mereka lakukan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan Burhan Bungin

(2008), cukup membantu mengarahkan penelitian ini dalam menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere yang menjadi objek penelitian pada upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Pengumpulan data pada penelitian ini tidak bersifat kaku, akan tetapi senantiasa disesuaikan dengan keadaan atau fenomena di lapangan yang ada di Pelabuhan Paotere. Dengan demikian, hubungan antara peneliti dengan apa yang diteliti tidak dapat dipisahkan, validitas data sangat ditentukan oleh penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk selalu cermat, tanggap dan mampu memberi makna fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa macam cara. Teknik pengumpulan data selama penelitian lapangan disesuaikan dengan sifat penelitian dan fokus penelitian dalam usaha menggambarkan nilai-nilai budaya dan struktur yang terbangun dalam kelompok sosial, rentetan peristiwa aktual yang dialami individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat serta gejala-gejala sosial lainnya yang memiliki korelasi dengan budaya dan perilaku masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, utamanya di kawasan Pelabuhan Paotere. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis merujuk pada teknik yang diajukan Bungin (2008) tentang teknik pengumpulan data yang tepat untuk penelitian kualitatif, antara lain adalah teknik wawancara dan pengamatan. Sekurang-kurangnya dengan teknik ini mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang valid.

1. Observasi

Jenis pengamatan yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah pengamatan biasa (tidak berperanserta), di mana peneliti memposisikan diri dengan jarak subjek yang akan diteliti dan hanya melakukan pengamatan dari luar dan mengamati ke dalam lingkungan dan terhadap aktivitas beberapa subjek yang penulis identifikasi memiliki kaitan aktivitas di pesisir Pelabuhan Paotere dan wilayah sekitarnya. Hal ini dikarenakan kondisi di lapangan dan momentum tertentu (kegiatan-kegiatan keseharian di dalam rumah) tidak memungkinkan bagi penulis untuk melakukan peran serta, sehingga tidak semua kondisi aktual dapat diamati langsung. Penulis dalam penelitian lapangan tetap berupaya untuk melakukan pengamatan terhadap situasi, yakni di mana subjek dalam penelitian berada dalam situasi informal seperti misalnya penggambaran terhadap perilaku (cara berbicara, ekspresi, emosi/perasaan, tata kelakuan, cara berkomunikasi dan sebagainya) dari subjek pada saat terlibat dalam perbincangan ataupun aktivitas dalam lingkungan sosial yang

dikategorikan sebagai arena subjek melakukan praktik dalam lingkungannya di Pelabuhan Paotere. Dengan teknik ini penulis mendapatkan adanya data tentang bentuk dan pola interaksi dan aktivitas subjek dalam penelitian secara umum yang menjadi acuan untuk menyimpulkan praktik atau perwujudan nilai budaya yang masyarakat Pelabuhan Paotere sebagai mapenulisrakat Maritim (dari beberapa subjek/sampling yang diamati) dengan lingkungan sosial maupun arena, serta institusi-institusi sosial yang memiliki kaitan dengan aktivitas kemaritimannya.

2. Wawancara

Proses wawancara yang dilakukan selama melakukan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Dengan kegiatan wawancara ini, penulis dapat menggali beberapa topik yang memberikan pemahaman dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai topik praktik-praktik nilai budaya dan institusi sosial yang sedikit banyak berorientasi pada lingkungan kemaritiman. Beberapa rangkaian wawancara dilakukan untuk memperoleh berbagai macam penjelasan yang relevan dengan masalah penelitian, misalnya yang peneliti dapatkan dalam penuturan beberapa informan yang menceritakan dirinya dalam aktivitasnya sehari-hari. Dari rangkaian penjelasan tersebut peneliti mendapatkan potongan-potongan peristiwa konkrit tentang aktivitas. Model ini ditempuh guna mendalami situasi dan kondisi, serta lebih memperhatikan aspek informan agar dapat mengetahui informasi yang diperlukan, peneliti tidak terpaku pada pedoman pertanyaan penelitian, melainkan memperhatikan sifat dan ciri unik dari informan pada saat wawancara. Dengan begitu, wawancara lebih memunculkan kesan obrolan, sambil bercanda, sambil melakukan hal-hal yang sifatnya tidak kaku. Wawancara mendalam dilakukan untuk menjawab segenap fokus penelitian yang telah dirumuskan.

F. PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Budaya dalam Pranata Masyarakat Pelabuhan Paotere

Dalam penelitian ini, penulis memahami konstruksi masyarakat pesisir dengan mengacu pada konteks reproduktif, yaitu suatu konstruksi masyarakat yang kehidupan sosial budayanya dipengaruhi secara signifikan oleh eksistensi kelompok-kelompok sosial yang kelangsungan hidupnya sedikit banyak terpengaruh pada pasar dan arus globalisasi. Dengan memperhatikan struktur sumber daya ekonomi lingkungan yang menjadi basis kelangsungan hidup dan sebagai satuan sosial, masyarakat pesisir seperti di Pelabuhan Paotere memiliki identitas kebudayaan yang berbeda dengan satuan-satuan sosial lainnya, seperti petani di dataran rendah, peladang di lahan kering dan dataran tinggi, kelompok masyarakat di sekitar hutan, dan satuan sosial lainnya yang hidup di daerah perkotaan. Hal ini juga mengacu dengan pendapat Keesing (1989: 68-69) bahwa bagi masyarakat nelayan, kebudayaan

merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai "pedoman kehidupan," referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya.

Dalam wujudnya nilai-nilai budaya bermanifestasi ke dalam lembaga yang dipatuhi oleh masyarakat pendukung yang ada di Pelabuhan Paotere. Lembaga (*institution*) menjadi sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok anggota masyarakat yang ada di Pelabuhan Paotere. Setiap nilai atau norma beserta praktiknya harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat dan bereproduksi seiring jalannya dinamika perubahan. Fenomena struktur sosial di Pelabuhan Paotere setidaknya dalam pemahaman penelitian ini membantu kemampuan survival masyarakat atau penyesuaian diri individu terhadap lingkungan kehidupannya. Perspektif antropologis untuk memahami eksistensi suatu masyarakat bertitik tolak dan berorientasi pada hasil hubungan dialektis antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Karena itu, dalam beragam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia, satuan sosial yang terbentuk melalui proses demikian akan menampilkan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai upaya memahami masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan yang bermukim dan melakukan aktivitas di wilayah Pelabuhan Paotere, berikut ini akan dideskripsikan beberapa aspek antropologis yang dipandang penting sebagai pembangun identitas nilai budaya masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere, seperti dalam pranata sistem gender dan ekonomi yang didukung dengan sistem nilai dan norma yang menjadi kecenderungan masyarakat pendukungnya.

Sikatutui, diartikan sebagai mewaspada (hati-hati). Pada masyarakat maritim norma seperti ini dipahami dan berfungsi dalam memanfaatkan potensi laut sesuai kebutuhannya baik untuk kepentingan sesaat, maupun untuk kepentingan masa yang akan datang. Kaitannya dengan lingkungan sosial di Pelabuhan Paotere ditemukan beberapa individu yang melaksanakan aktivitas ekonomi seperti yang dilakukan oleh salah satu informan (Hatta, wawancara tanggal 24 April 2019) yang mengemukakan bahwa di antara pedagang ikan di pelelangan sangat memperhatikan perkembangan kondisi jual-beli ikan. Faktor alam (cuaca) sangat diperhitungkan karena berpengaruh pada pasokan ikan dan harga ikan dalam kondisi cuaca yang buruk dapat berubah drastis. Di antara pedagang ikan sedikit banyak mampu mengatasi persoalan permintaan pasar dengan melakukan rasionalisasi terhadap harga ikan. Begitu pula dengan jenis-jenis ikan yang ditawarkan, para pedagang ikan telah memiliki pengetahuan tentang harga ikan berdasarkan jenis, dan pengetahuan jenis ikan berdasarkan musimnya yang menyebabkan mereka ketika musim tertentu mempersiapkan modal untuk dapat mendapatkan ikan yang diinginkan sesuai dengan permintaan pasar.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere cukup ekonomis dan pragmatis dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada di wilayah

Pelabuhan Paotere. Kecenderungannya terlihat pada praktik pedagang tersebut dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan rasionalisasi pasar untuk mendapatkan keuntungan dan memperlihatkan nilai *sikatutui* bekerja dalam pranata ekonomi masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere. Nilai *sikatutui* juga akhirnya menjadi semacam tolak ukur dalam praktik masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kepribadian praktis. Praktis yang dimaksud adalah pola pemikiran atau cara pikir mereka sangat mengedepankan efisiensi. Hal ini disebabkan karena mereka menghadapi persoalan yang secara langsung mereka dapatkan saat mereka berada pada kondisi ekonomi tertentu, di mana masalah tersebut harus dengan segera diatasi.

A'bulo Sibatang, diartikan sebagai semangat bersatu. Nilai ini dipahami sebagai terwujudnya interkoneksi antara manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere memiliki kecenderungan dalam konsep nilai ini pada model struktur sosialnya terutama relevansinya pada relasi gender. Data pengamatan di wilayah Pelabuhan Paotere bahkan pasar yang ada di kompleks tersebut menemukan mayoritas pedagang atau penjaja jualan didominasi oleh kaum perempuan. Meskipun data statistik mengenai jumlah mereka, namun setidaknya nuansa yang tertangkap pada fenomena yang ada di wilayah Pelabuhan Paotere dan pasar tersebut cukup signifikan. Wawancara dengan salah satu informan (Hartati, wawancara tanggal 25 April 2019) mengemukakan bahwa sejak semakin berkembangnya pasar dan wilayah Pelabuhan Paotere, semakin banyak perempuan yang beraktivitas di tempat tersebut sebagai pedagang barang rumah tangga maupun penjual ikan. Ia juga menuturkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak lain adalah cara dalam menghadapi tuntutan ekonomi. Meski dengan kondisi tersebut mereka tetap tidak melupakan peran mereka sebagai keluarga, terlebih sebagai seorang istri. Bahkan menurutnya, hal tersebut justru akan membantu suami dalam mencari nafkah dan memperlihatkan peran seorang istri yang juga memiliki kemampuan mencari penghasilan. Hal tersebut sudah menjadi lumrah pada kelompok masyarakat di Pelabuhan Paotere, peran perempuan di luar rumah justru saling mendukung dengan peran laki-laki utamanya dalam keluarga.

Struktur sosial tersebut mengindikasikan relasi-relasi gender yang terbangun yang dipraktikkan masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere sebagai manifestasi nilai *a'bulo sibatang*. Infrastruktur ekonomi masyarakat nelayan meniscayakan formasi sosial yang harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, sehingga batas-batas peran antara laki-laki dan perempuan semakin meluas dengan mereproduksi nilai *a'bulo sibatang* ke dalam kondisi sosial di mana dominasi ekonomi menjadi faktor tunggal dalam lingkungan sosial di dalam masyarakat nelayan. Kondisi tersebut akhirnya yang menjadikan dan memproduksi tindakan individu-individu di Pelabuhan Paotere dalam praktik dan budayanya hari ini. Di antara hal tersebut dapat pula kita amati pada etos kerja yang tinggi di masyarakat nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Kecenderungan

masyarakat nelayan yang bersifat kompetitif dan mengandalkan kemampuan diri untuk mencapai keberhasilan menjadikan mereka memiliki sikap apresiatif terhadap keahlian dan prestasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya.

Salah satu ciri lain yang terkadang dipandang negatif dari perilaku masyarakat pesisir Makassar terkait dengan sikap mereka dalam mengandalkan kemampuan diri sendiri adalah sikap temperamental dan harga diri. Hal ini juga ditunjukkan oleh orang pesisir lainnya yang memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan cenderung mudah balas-membalas sampai dengan melakukan pembunuhan kepada orang lain yang membuat mereka sakit hati. Selain itu, orang pesisir Makassar juga memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka terhadap sesuatu. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi.

Selain nilai di atas, nilai lain yang mengemuka dalam budaya masyarakat nelayan Makassar adalah *Sipakatau* (saling menghargai, mempercayai). Dalam ranah ekonomi, nilai ini dianggap sangat penting terutama dalam relasi-relasi usaha yang di wilayah Pelabuhan Paotere. Saling mempercayai merupakan modal sosial utama untuk kemudian bereproduksi ke dalam pranata ekonomi. Kita ambil fakta di lapangan dengan mengamati aktivitas pelelangan ikan. Beberapa nelayan yang menjual ikannya di wilayah Pelabuhan Paotere tidak sedikit yang mempercayakan hasil tangkapannya kepada *pa'cata* atau broker yang memiliki keterampilan dalam melelang ikan. Di samping itu, peran mereka dalam struktur ekonomi juga memperlihatkan jaringan mereka dengan dunia bisnis yang cukup kompleks dalam sistem jual-beli di Pelabuhan Paotere. Peran *pa'cata* apabila cukup sukses dalam memberikan keuntungan kepada nelayan telah mempercayakan hasil tangkapannya untuk dilelang akan menjadi berlanjut secara jangka panjang dalam relasi bisnis ke depannya. Di antara kedua relasi tersebut, memberikan nilai keuntungan sudah seharusnya dilandasi oleh nilai *sipakatau*. Pada penggambaran ini cukup jelas terlihat nilai *sipakatau* menjadi fondasi utama dalam pranata ekonomi, sebagai modal kultural, nilai telah terkonversi menjadi modal ekonomi.

Sebagian nilai-nilai budaya yang dipraktekkan masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere di atas merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepepesisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.

Reproduksi Nilai Budaya Dalam Pranata Masyarakat Pelabuhan Paotere

Masalah utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah asumsi yang memahami Pelabuhan Paotere sebagai daerah yang tidak lagi memiliki batas area kebudayaan yang jelas dan cenderung mengabur. Suatu kondisi yang disebabkan oleh arus modernisasi serta kecanggihannya globalisasi yang melingkupi budaya masyarakat Pelabuhan Paotere yang tidak menutup kemungkinan proses dinamika yang terjadi di dalamnya cukup kompleks untuk dipahami melalui pendekatan tertentu. Hal ini pula mendorong dalam penelitian ini untuk mengungkap aspek perubahan tersebut, terutama pada aspek nilai budaya yang ditenggarai turut berubah seturut kondisi masyarakat yang secara geografis berada di pesisir dan cukup terbuka membentuk interaksi serta mobilitas yang tinggi dengan dunia luar. Budaya lokal di Pelabuhan Paotere setidaknya ditenggarai mengalami transformasi yang disebabkan karena proses adaptasi dengan kebudayaan lain. Adaptasi ini menyangkut nilai serta praktik-praktik kehidupan, dalam hal ini keberagaman kebudayaan akan terlihat sebagai suatu kekayaan dan bukan sebagai suatu ancaman bagi kebudayaan lain. Dalam contoh nyata seperti di lingkungan pesisir Pelabuhan Paotere, adanya adaptasi kebudayaan dari masyarakat yang datang ke Pelabuhan Paotere menjadi penambah keberagaman dalam hal reproduksi nilai-nilai baru kepada masyarakat lokal.

Proses reproduksi budaya yang menjadi studi di Pelabuhan Paotere merupakan proses di mana penafsiran budaya yang dilakukan itu mencakup upaya-upaya untuk mereka-ulang makna-makna dan nilai-nilai kultural setempat, dan bahkan juga rekonfigurasi atas aspek-aspek struktur sosial yang berlaku. Di atas semua itu, konsep reproduksi budaya ini sejajar dengan apa yang dikemukakan oleh Bourdieu (Dalam Jenkins, 1992), mengandung pengertian atas nuansa politik yang lebih pekat, yaitu dalam hal ini merujuk pada proses di mana penafsiran itu diarahkan untuk mewujudkan modal kultural dalam rangka transaksi kepentingan pada arena pertarungan yang spesifik. Proses ini sendiri bukanlah hal yang netral karena di dalam reproduksi budaya ini, dengan segala ketidakpastiannya, akan turut direproduksi pula relasi-relasi kuasa yang turut menjamin operasinya. Inilah fungsi reproduksi sosial dari proses reproduksi budaya, seperti yang diistilahkan Bourdieu (Dalam Jenkins, 1992)

Lingkungan geografis Pelabuhan Paotere di pesisir pantai merupakan poin penting untuk memahami kecenderungan masyarakatnya terhadap dunia luar, termasuk adanya pendatang. Hal ini pula yang menyebabkan mobilitas masyarakat yang ada di dalamnya terbilang cukup tinggi, mengingat salah satu karakteristik masyarakat maritim adalah keterbukaan mereka dengan dunia luar. Mobilitas sosial membuat lingkungan sosial budaya setiap orang berubah-ubah, sehingga setiap orang seringkali dihadapkan pada nilai-nilai baru yang mengharuskan setiap orang menyesuaikan diri secara terus menerus. Dengan demikian, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, terjadi adaptasi kultural para pendatang dengan kebudayaan tempat ia bermukim, yang menyangkut adaptasi nilai dan praktik kehidupan secara umum. Kebudayaan lokal menjadi kekuatan baru yang

memperkenalkan nilai-nilai kepada pendatang, meskipun tak sepenuhnya memiliki daya paksa.

Sebagai setting lingkungan sosial yang ada di Pelabuhan Paotere merupakan arena yang memenuhi segala kemungkinan terjadinya reproduksi nilai-nilai budaya dalam pranata masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere. Globalisasi menjadi faktor pertama kecenderungan perubahan dari 'kebudayaan asal' menjadi lebih reproduktif. Ruang geografis pesisir memungkinkan banyaknya pendatang yang bermukim di daerah ini serta perannya sebagai salah sentra ekonomi perikanan dan kelautan yang setidaknya melingkupi kawasan sentral Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bahkan menjadi salah satu daerah yang sering dikunjungi pedagang ikan dari Kalimantan bila menghadapi musim barat. Infrastruktur Pelabuhan Paotere (Pelabuhan dan pasar) turut berkontribusi dalam membentuk formasi sosial ekonomi pada masyarakat di sekitar Pelabuhan Paotere. Dengan meminjam konsep pemikiran kalangan Neo-Marx tentang kapitalisasi dengan teori artikulasinya bahwa, kapitalisasi di negara berkembang diyakini tidak akan sama "modelnya" dengan kapitalisasi yang telah terjadi di negara Eropa, hal ini disebabkan karena adanya resistensi tatanan lokal yang ikut mewarnai proses tersebut, sehingga kapitalisme yang terbentuk akan memiliki karakter dan ciri tersendiri berdasarkan pengaruh kontekstual tingkat lokal (Mulyanto, 2010). Oleh karena itu, struktur sosial masyarakat itu terdiri dari elemen-elemen yang tidak massif, sehingga kombinasi *modes of production* menentukan karakteristik ekonomi dalam sebuah masyarakat.

Terdapat suatu pandangan komunalisme dalam budaya masyarakat nelayan Makassar bahwa laut adalah milik bersama. Dalam pengertian lokal, masyarakat nelayan pesisir di Pelabuhan Paotere memiliki pengertian bahwa laut tidak hanya dimiliki oleh satu orang atau segolongan saja yang memiliki hak tunggal dalam memanfaatkannya. Karena itu, maka setiap orang dari mana pun asalnya, dapat memanfaatkan seluruh wilayah perairan. Hal ini ditunjukkan dengan aktivitas di wilayah Pelabuhan Paotere di mana keluar masuknya orang di kawasan ini setiap harinya dalam melakukan berbagai aktivitas, juga kemudian menjamin terjadinya intraksi antara orang luar dengan orang dalam itu sendiri di Pelabuhan Paotere.

Dari informasi yang dikemukakan oleh masyarakat, salah satunya Pak Nawir (Wawancara tanggal 25 April 2019) mengatakan bahwa pada masa lampau, nelayan-nelayan yang berdatangan ke perairan yang bukan daerahnya dan berlabuh di pesisir pantai di Pelabuhan Paotere akan diterima sebagai tamu, dijaga, dilayani dan diperlakukan layaknya saudara sendiri, meskipun di antara mereka tidak ada sama sekali hubungan kekerabatan. Ini dilakukan karena mereka mereka juga sering mengunjungi daerah lain terutama melalui jalur laut. Pada sekitar tahun 1960-an dan sebelumnya, sebagian kecil dari masyarakat nelayan bermata pencaharian sebagai pelayar dan pedagang antar pulau. Mereka sering mendatangi berbagai tempat dalam wilayah Sulawesi dan sekitarnya, dan merasa diterima oleh

penduduk setempat dengan sangat baik. Mereka percaya bahwa bila mereka memperlakukan orang yang datang ke daerah mereka dengan baik, maka perlakuan serupa akan mereka dapatkan di tempat lain.

Sifat kebudayaan yang dinamis, menyebabkan terjadinya berbagai perubahan dalam masyarakat pendukungnya. Demikian pula halnya dengan pandangan yang dipegang oleh kelompok masyarakat di Pelabuhan Paotere, dimana dahulu umumnya masyarakat beranggapan bahwa semua laut adalah milik bersama dan bebas untuk memasukinya, di manapun letaknya. Namun di era otonomi daerah dan tekanan kebijakan mulai mengatur berbagai aktivitas di Pelabuhan Paotere, terutama di wilayah kompleks pelabuhan. Kecenderungannya pun terlihat ketika salah satu warga masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere (Nawir) mengatakan bahwa setiap daerah memiliki wilayah perairannya sendiri yang tidak boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh warga negara lainnya. Namun penetapan wilayah perairan pada setiap daerah tidak dapat diterima, karena pada masa yang lampau, tidak ada peraturan seperti itu, sehingga nelayan pendatang cukup melaporkan kedatangannya kepada pemerintah setempat dengan memperlihatkan surat izin usaha perikanan.

Penolakan terhadap kehadiran nelayan luar dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor apakah alat tangkap yang digunakan nelayan pendatang itu merugikan nelayan lokal atau tidak, dan apakah mereka bersikap sopan atau tidak. Namun kondisi di wilayah Pelabuhan Paotere masih cukup fleksibel. Faktanya, malah justru arus interaksi dengan dunia luar lebih intensif dengan adanya aktivitas pelelangan ikan di wilayah tersebut. Kebijakan dan peraturan daerah hanya mengatur masuknya jumlah ikan di wilayah dan retribusi yang ditarik dari hasil pelelangan, begitu pula kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Paotere.

Bila dahulu, nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere dalam hal ini laut merupakan milik bersama yang didefinisikan secara harfiah, maka kini laut milik bersama dianggap memiliki batasan-batasan yang ditetapkan secara nasional dan lokal. Di tingkat nasional, negara memiliki batas-batas yang merupakan teritori hukum dan politik, sedangkan di tingkat lokal, terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah yang berbasis pada Daerah atau kabupaten, menjadikan penerjemahan mereka terhadap pandangan tersebut berubah dengan menganggap bahwa wilayah laut yang terletak disekitar daerah tempat pemukiman mereka merupakan milik mereka yang bermukim di daerah tersebut.

Dalam penerapannya, tidak berarti dalam bentuk perilaku dan sikap pandangan tersebut diberlakukan secara kaku. Hingga kini masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere masih tetap memberi izin kepada nelayan dari luar untuk beroperasi, dengan kewajiban mematuhi berbagai aturan yang disepakati bersama. Ada beberapa aturan yang kemudian mendukung dan memperkuat penerapan pandangan ini, meskipun tidak tertulis namun ditaati baik oleh nelayan lokal maupun nelayan pendatang. Aturan tersebut dapat dibagi atas

dua yaitu aturan yang mengatur masalah pemanfaatan daerah laut secara bersama, dan aturan dalam hal kedaulatan penduduk setempat.

Dari sini kita dapat menjelaskan bahwa globalisasi bukan merupakan proses satu arah karena adanya kecenderungan untuk terjadi dialog dengan sifat-sifat lokal yang menentukan penerimaan atau penolakan unsur-unsur dan barang baru dalam berbagai bentuk. Penduduk kota mulai membutuhkan produk global sebagai instrumen untuk mengartikulasikan kelas dan identitas kelompok untuk membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini terutama sejalan dengan tumbuhnya kelas menengah yang begitu pesat sejak tahun 1980-an di Indonesia (Kuntowijoyo, 1991), yang merupakan kelompok yang paling berpengaruh dalam reproduksi gaya hidup. Label “produk luar negeri” merupakan semacam fasilitas bagi ekspresi diri kelas menengah kota.

Jalannya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan tadi diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai dalam masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai salah satu sebab terjadinya reproduksi budaya dapat melalui dua cara, yaitu melalui *discovery* dan *invention* (Soerjono Soekanto, 1982). *Discovery* adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat, ataupun yang berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. *Discovery* baru menjadi *invention* kalau masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru itu (Koentjaraningrat, 1965).

Di dalam setiap masyarakat tentu ada individu yang sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakatnya. Di antara orang-orang tersebut banyak yang menerima kekurangan-kekurangan tersebut sebagai sesuatu hal yang harus diterima saja. Orang lain mungkin tidak puas dengan keadaan, tetapi tidak mampu memperbaiki keadaan tersebut. Mereka inilah yang kemudian menjadi pencipta-pencipta baru tersebut. Keinginan akan kualitas juga merupakan pendorong bagi terciptanya penemuan-penemuan baru. Keinginan mempertinggi kualitas suatu karya merupakan pendorong untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan ciptaan baru. Penemuan baru dalam kebudayaan rohaniah dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan.

G. PENUTUP

Perubahan konteks sosial semacam ini di Pelabuhan Paotere tidak terlepas dari sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak 1980-an. Telah dijelaskan bahwa Pelabuhan Paotere tidak dapat mengisolasi dirinya dengan kecenderungan arus global yang semakin kuat. Dalam proses ini, integrasi Indonesia ke dalam pasar internasional tidak dapat ditolak. Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar yang potensial bagi produk global. Perbaikan infrastruktur dan peran media sebagai salah satu faktor terpenting, telah memungkinkan mengalirnya barang-

barang dan informasi global yang dengan mudah diperoleh di berbagai tempat yang pada gilirannya mengubah mode konsumsi berbagai suku bangsa. Namun demikian, globalisasi juga harus dilihat sebagai tekanan terhadap kehidupan sosial secara umum karena hal itu merupakan faktor mendasar dalam transformasi masyarakat.

Penelitian kesukubangsaan umumnya menitikberatkan kebudayaan sebagai “pedoman” dalam adaptasi dan kelangsungan hidup, sehingga lebih melihat aspek produktif dari sebuah kebudayaan. Sementara itu aspek reproduktif yang menjadi kecenderungan baru di dalam menjelaskan perubahan-perubahan kontemporer, masih kurang diperhatikan. Dalam konteks Indonesia, diskusi yang mengarah pada proses pemaknaan kembali kultur daerah asal ini masih bersifat baru, khususnya dalam memberikan pemahaman baru mengenai konteks sosial budaya yang berubah-ubah (Abdullah, 2006).

Sebagian dari reproduksi nilai-nilai perilaku sosial yang telah dikemukakan dalam pembahasan merupakan modal sosial yang sangat berharga jika didayagunakan untuk membangun masyarakat nelayan di Pelabuhan Paotere sebagai bagian integral dari masyarakat pesisir. Penjelajahan terhadap nilai-nilai budaya kepebisiran ini tentu saja memiliki kontribusi yang sangat strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berbasis pada potensi sumber daya kemaritiman nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Horton, Paul B & Chester I. Hunt. 1996. *Sosiologi Jilid 1*. Erlangga: Jakarta (hlm. 244)
- Idat, Abdul Wahid. 2003. *Pranata Sosial Dalam Masyarakat Sunda*. Pusat Bahasa Depdiknas: Jakarta. (hlm. 9)
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer*. Erlangga: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru: Jakarta.
- Kluckhohn, Clyde .1984. “Cermin Bagi Manusia”, dalam Parsudi Suparlan (ed.). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Rajawali Pers: Jakarta. (hal. 69)
- Mattulada. 1982. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510-1700) cet. 1*. Bhakti Baru: Ujungpandang.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Remaja Rusda Karya: Bandung.
- Mulyanto, Dede. 2010. *Kapitalisme: Perspektif Sosio-Historis*. Ultimus: Bandung
- Nishimura, Asahitaro. 1973. *A Preliminary Report On Current Trends In Marine Anthropology*. Occasional Papers of The Center of Marine Ethnology No. 1. Waseda University: Tokyo

- Raka, I. G. 2011. *Pendidikan Karakter*. Paper. Kuliah Umum Didepan Civitas Akademika Unhas. Makassar, Juli 2011.
- Sallatang, Arifin. 1982. *Punggawa-Sawi Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. Disertasi. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Soemardjan, Selo & Soelaeman Soemardi. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.